

Penentuan Status Pengelolaan Perikanan Udang Pada Domain Kelembagaan Dengan Pendekatan Eafm Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

Determination of Status Shrimp Fisheries Management in Moisture Domain with EAFM Tools at Sorong South District West Papua Provinsi

Warda Amir^{1*}, Abud Darda Razak², Ahmad Fahrizal², Inayah³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sorong

³WWF Indonesia di Sorong

a.fahrizal.ab@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pengelolaan perikanan dengan Pendekatan Ekosistem pada domain kelembagaan khususnya komoditas perikanan udang di Kabupaten Sorong Selatan. Metode penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara (kuisisioner). Hasil penilaian dari 6 (enam) indikator kelembagaan, satu diantaranya (indikator mekanisme pengambilan keputusan) memiliki kontribusi paing sedikit, dengan nilai 1 sehingga berpengaruh terhadap status pengelolaan perikanan di Sorong Selatan yang berstatus sedang, dengan nilai 2 (*flag model* kuning). Hal tersebut disebabkan belum adanya mekanisme pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan khususnya udang di Kab. Sorong Selatan. Kesimpulannya, perlu dilakukan *Restoration Strategy* (strategi pemulihan/perbaikan), strategi pemeliharaan (*Conservation Strategy*) dan mempertahankan strategi yang sudah dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi (*Maintain Existing Strategy*) oleh DKP dan lembaga/*stakeholders* terkait untuk setiap indikator dalam meningkatkan status pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) khususnya komoditas udang di Kab. Sorong Selatan.

Kata kunci : Penilaian perikanan, pengelolaan perikanan, domain kelembagaan, perikanan udang, EAFM.

Abstrack

This study aims to determine the status of fisheries management with the Ecosystem Approach in the institutional domain, especially shrimp fisheries commodities in South Sorong Regency. The research method uses the method of observation and interview (questionnaire). The results of the assessment of 6 (six) institutional indicators, one of which (indicator of decision making mechanism) has the least contribution, with a value of 1 so that it affects the status of fisheries management in South Sorong, with a value of 2 (yellow flag model). This is due to the absence of decision-making mechanisms related to fisheries management, especially shrimp in Kab. South Sorong. In conclusion, it is necessary to do a Restoration Strategy, a recovery strategy and maintain the strategies that have been carried out by conducting monitoring and evaluation (Maintain Existing Strategy) by DKP and related institutions / stakeholders for each indicator in improving management status. fisheries with ecosystem approach (EAFM) especially shrimp commodities in Kab. South Sorong.

Keywords: fisheries assessment, fisheries management, institutional domain, shrimp fisheries, EAFM.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Panjang garis pantai mencapai 95.181 km dan memiliki 17.408 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perairan Indonesia mengandung 27.2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12% *mammalia*, 23.8 % *amphibia*, 31.8% *reptilia*, 44.7% ikan, 40% *moluska*, dan 8.6% rumput laut. Adapun potensi sumberdaya ikan meliputi, sumberdaya ikan pelagis besar, sumberdaya ikan pelagis kecil, sumberdaya udang *penaeid* dan *krustasea* lainnya, sumberdaya ikan demersal, sumberdaya *moluska* dan teripang, cumi-cumi, sumberdaya benih alam komersial, sumberdaya karang, sumberdaya ikan konsumsi perairan karang, sumberdaya ikan hias, penyu, *mammalia*, dan rumput laut (Adrianto *et al.*, 2014).

Kabupaten Sorong Selatan misalnya, Kabupaten ini kaya akan sumberdaya laut, salah satunya adalah Udang *Penaeid*. (Akademi Perikanan Sorong 2004) menyatakan bahwa hasil tangkapan udang *penaeid* di perairan Kabupaten Sorong Selatan cukup tinggi sehingga diduga potensinya cukup besar. Tingginya potensi sumber daya perikanan yang terdapat di Kabupaten Sorong Selatan harusnya dapat dikelola dengan optimal sesuai dengan kaidah-kaidah pemanfaatan yang berkelanjutan.

Maraknya pemanfaatan perikanan dan sumber daya laut di Kabupaten Sorong Selatan berpotensi menyebabkan berbagai ancaman baik dari segi ekologi maupun sosial, seperti; 1) menurunnya hasil tangkapan ikan, 2) lokasi penangkapan yang semakin bertambah jauh, dan 3) lahirnya konflik antar masyarakat terkait lokasi pemanfaatan sumber daya laut. Kondisi tersebut diperburuk oleh jumlah masyarakat pesisir yang semakin bertambah. Pengalihan fungsi lahan untuk pemukiman dan bertambahnya aktivitas pembangunan dapat mereduksi norma-norma adat yang berpengaruh terhadap entitas budaya masyarakat adat pesisir Kabupaten Sorong Selatan (USAID SEA Project, 2017).

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh (Undang-Undang No 31, 2004) yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada (Undang-Undang No 45, 2009). Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis,

perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati (WWF Indonesia).

Secara alamiah, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri. (Charles, 2008). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab oleh pengguna sumberdaya tersebut dan juga *stakeholders* terkait agar potensi sumberdaya tetap terjaga. Salah satunya dengan melakukan pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau EAFM (*ecosystem approach to fisheries management*).

Domain Kelembagaan, merupakan salah satu dari enam domain EAFM. Peran Kelembagaan sendiri sangat diperlukan dalam pengelolaan perikanan. (Ostrom 1985; Miller dan Wyborn 2018), menyatakan bahwa kelembagaan merupakan aturan dan rambu-rambu yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Dengan adanya kelembagaan, pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan dapat tertata, baik dari segi pemanfaatan, kebijakan dan pengawasannya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Penentuan Status Pengelolaan Perikanan udang pada Domain Kelembagaan dengan *Tools* EAFM Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat”**.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM) pada domain kelembagaan untuk komoditas udang di Kabupaten Sorong Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui status pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM) pada domain kelembagaan untuk komoditas udang di Kabupaten Sorong Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2018 sampai selesai, berlokasi di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini bersifat observasi, yaitu pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004) dan Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviews* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Subagyo 2011). Alat dan bahan pada penelitian ini adalah: alat tulis, perekam, kamera, papan pengalas, kuisisioner.

Prosedur penelitian yang dilakukan pada kegiatan penelitian ini adalah penyiapan kuisisioner penelitian dan *desk study* selama 1 Minggu serta pengambilan data selama 1 minggu. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisa bendera (*Flag Analysis*) yang mengacu pada modul EAFM 2014 (Adrianto *et al.*, 2014). Nilai indeks dari masing-masing indikator ini, nantinya akan dijumlahkan dalam domain kelembagaan menjadi suatu nilai indeks komposit domain kelembagaan. Kemudian, nilai indeks komposit ini akan dikategorikan menjadi 5 penggolongan kriteria dan ditampilkan dengan menggunakan bentuk model bendera (*flag model*) seperti disajikan pada (Tabel 1), di bawah ini:

Tabel 1. Penggolongan nilai indeks komposit dan visualisasi model bendera

Nilai Agregat Komposit	Model Bendera	Deskripsi/Keterangan
100 - 125		Buruk
126 - 160		Kurang Baik
161 - 220		Sedang
201 - 250		Baik
251 - 300		Baik Sekali

Sumber : WWF - FPIK UHO | Penilaian performa perikanan menggunakan indikator EAFM di kawasan KKPD Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Dalam Domain Kelembagaan

Domain Kelembagaan terdiri dari enam indikator yang menjelaskan pengelolaan sumberdaya udang khususnya udang Banana/udang putih (*Penaeus merguensis*) di Kabupaten Sorong Selatan dari aspek Kelembagaan. Enam indikator tersebut terdiri dari:

Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Perikanan Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Telah Ditetapkan Baik Secara Formal Maupun Non-Formal

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal didefinisikan : tingkat kepatuhan (*compliance*) seluruh pemangku kepentingan WPP terhadap aturan main baik formal maupun tidak formal. Berdasarkan hasil survey wawancara dengan *stakeholders (formal)* dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Polisi Air, tidak ada laporan tertulis terkait pelanggaran dari masyarakat kepada institusi pemerintah atau penegak hukum di Distrik Teminabuan, Konda dan Inanwatan.

Berdasarkan wawancara *stakeholders (informal)* dengan Kepala Kampung, Koordinator Nelayan, Ketua DAS dan Ketua adat, masih ada penggunaan penggunaan akar bore dan tertangkapnya spesies ETP di jaring (*trammel Net*) Nelayan, diantaranya: penyu, hiu gergaji dan lumba-lumba. Spesies ETP tersebut ada yang langsung di lepas (Lumba-lumba) dan ada yang diambil masyarakat untuk dijual dalam bentuk produk kering (penyu, hiu gergaji (*Pristis microdon*), hiu banteng (*Carcharhinus leucas*), hiu martil (*Sphyrna lewini*), dan pari (*Rhinobatos* sp.) (Razak 2018). Namun aturan/regulasi tertulis di tingkat kampung dan adat belum dibuat sehingga pelanggaran tersebut masih dianggap hal yang wajar. Berdasarkan kriteria pelanggaran terhadap aturan perikanan dapat dikategorikan baik dengan skor 3, sedangkan untuk pelanggaran terhadap aturan non formal diberikan skor 2.

Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan

Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan didefinisikan: sejauh mana kelengkapan regulasi dalam pengelolaan perikanan tersedia, untuk mengatur praktek pemanfaatan sumberdaya ikan sesuai dengan domain EAFM, yaitu; regulasi terkait keberlanjutan sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Ada atau tidak penegakan aturan main dan efektivitasnya.

Berdasarkan survey dan wawancara dengan DKP, terdapat peraturan terkait pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong selatan untuk domain Sumber Daya Ikan (Razak 2018), Habitat dan Ekosistem, Teknik Penangkapan Ikan serta Ekonomi, Namun POKMASWAS yang dibentuk untuk melakukan pengawasan tidak berjalan efektif sehingga penegakan aturan main dalam hal ini bentuk penindakan serta hukuman/teguran terhadap penggunaan akar bore dan tertangkapnya spesies ETP tidak dijalankan.

Peraturan/regulasi pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:

1. UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
2. Perda Kab. Sorsel No. 11 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sorong Selatan dan
3. RPJMD 2016-2021

Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan diberikan kriteria 2 yaitu ada tapi tidak lengkap dimana untuk elaborasi kriteria 2, tergolong dalam point 2 yaitu ada tapi jumlahnya tetap. Bagi penegakan aturan main, diberikan kriteria 1 yaitu tidak ada penegakan aturan main. Alat dan orang diberikan kriteria 2 yaitu ada alat dan orang tapi tidak ada tindakan. Teguran dan hukuman diberi kriteria 1 yaitu tidak ada teguran maupun hukuman.

Mekanisme pengambilan keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan didefinisikan: ada atau tidaknya mekanisme pengambilan keputusan (SOP) dalam pengelolaan perikanan. Berdasarkan survey dan wawancara terhadap stakeholders belum ada mekanisme pengambilan keputusan di tingkat daerah akibat (Undang-Undang No 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah

dimana pengelolaan perikanan yang awalnya menjadi wewenang daerah dilimpahkan ke Provinsi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama dengan lembaga terkait (WWF) sedang melakukan inisiasi untuk menghasilkan SOP yang nantinya akan digunakan dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka indikator mekanisme pengambilan dikategorikan dalam kriteria 1 yaitu tidak ada mekanisme pengambilan keputusan; Pengambilan keputusan dikategorikan 1 yaitu ada keputusan tapi tidak dijalankan.

Rencana pengelolaan perikanan

Rencana pengelolaan perikanan didefinisikan : ada atau tidaknya RPP untuk wilayah pengelolaan perikanan dimaksud. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi dan daerah, RPP sudah ada, mengacu pada (Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 82 Tahun 2016) tentang RPP- WPP 715 tetapi RPP tersebut belum dijalankan. Untuk itu, rencana pengelolaan perikanan dimasukkan dalam kriteria 2 yaitu ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan.

Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan

Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan didefinisikan : Semakin tinggi tingkat sinergi antar lembaga (*span of control-nya rendah*) maka tingkat efektivitas pengelolaan perikanan akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat sinergi antar kebijakan maka tingkat efektivitas pengelolaan perikanan akan semakin baik.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi dan daerah Sinergisitas kebijakan antar lembaga belum berjalan sejak diberlakukannya (Undang-Undang No 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan wewenang pengelolaan perikanan kepada provinsi menyebabkan kebijakan antar lembaga (daerah dan provinsi) tidak saling mendukung. Dengan demikian, tingkat sinergisitas antar lembaga dikategorikan dalam kriteria 1 yaitu konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan), sedangkan sinergisitas antar kebijakan dikategorikan dalam kriteria 2 yaitu kebijakan tidak saling mendukung.

Kapasitas pemangku kepentingan

Kapasitas pemangku kepentingan didefinisikan : seberapa besar frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan berbasis

ekosistem. Data dari (USAID SEA Project, 2017; Project, 2018) melaporkan bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2018 pihak USAID SEA telah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem seperti Training/Workshop Konsep EAFM Papua Barat Peningkatan, Kapasitas RZWP3-K dan masih banyak kegiatan lainnya khusus untuk pengelolaan perikanan di wilayah kabupaten Sorong Selatan. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak USAID SEA melibatkan para pemangku kepentingan seperti masyarakat nelayan, tokoh adat dan masyarakat, DKP, dan instansi terkait lainnya.

Data dari DKP (berdasarkan wawancara) bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari DKP untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan dari tahun 2017 hingga 2018, seperti training perbaikan alat tangkap (trammel net) dan mesin, BIMTEK cek fisik kapal dan studi banding terkait pembesaran kepiting bakau. Kegiatan tersebut diikuti oleh staf DKP dan juga nelayan lokal (Kokoda) tetapi belum difungsikan dan tidak sesuai dengan bidang (keahlian) dari staf tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan kriteria skor maka termasuk dalam skor 2 yaitu ada tapi tidak difungsikan (keahlian yang didapat tidak sesuai dengan fungsi pekerjaannya).

Aggregat

Hasil penilaian domain kelembagaan menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan untuk komoditas udang banana/putih (*Penaeus merguensis*) berada pada kondisi sedang, dengan rerata 1.69 seperti terlihat pada (Tabel 2).

Table 2. Analisis *flag model* enam indikator domain kelembagaan

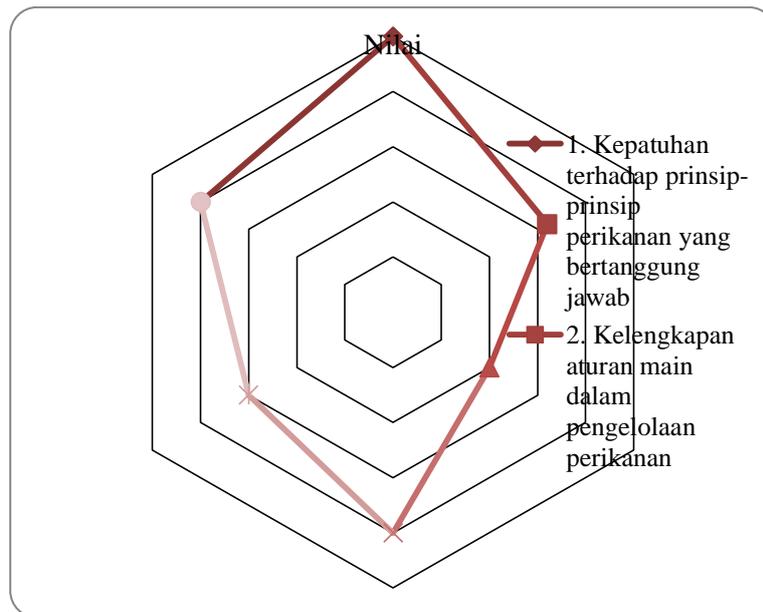
Indikator	Nilai
1. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab	2.50
2. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan	1.60
3. Mekanisme pengambilan keputusan	1.00
4. Rencana pengelolaan perikanan	2.00
5. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan	1.50
6. Kapasitas pemangku kepentingan	2.00
Rerata	1.69

Sumber: Analisis data primer

Indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan merupakan satu-satunya indikator yang berstatus baik, dalam *flag model* ditandai dengan warna hijau karena dalam pelaksanaannya tidak ditemukan pelanggaran formal dan informal secara tertulis. penggunaan akar bore untuk menangkap udang dan tertangkapnya spesies ETP oleh jaring (*trammel Net*) masih dianggap hal yang lumrah (bukan pelanggaran) karena belum ada aturan/regulasi yang disepakati bersama di tingkat kampung dan adat (informal).

Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan dalam *flag model* ditandai dengan warna kuning (status sedang) karena terdapat aturan yang terkait dengan pengelolaan perikanan yang bersumber dari (Undang-undang No. 31, 2004), Perda Kab. Sorsel No. 11 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sorong Selatan dan RPJMD 2016-2021 untuk domain Sumber Daya Ikan (Razak, 2018), Habitat dan Ekosistem, Teknik Penangkapan Ikan serta Ekonomi, namun pengawasan dan penegakan aturan main belum dijalankan.

Indikator mekanisme pengambilan keputusan merupakan satu-satunya indikator yang berstatus buruk, dalam *flag model* ditandai dengan warna merah karena belum ada mekanisme pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan akibat diberlakukannya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator rencana pengelolaan perikanan dalam *flag model* ditandai dengan warna kuning (status sedang) karena sudah ada RPP (KEPMEN-KP no. 82 /2016 tentang RPP-WPP 715) namun belum dijalankan oleh pemangku kepentingan dan juga pengguna sumberdaya. Indikator tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan dalam *flag model* ditandai dengan warna kuning (status sedang) karena sinergitas kebijakan antar lembaga belum berjalan sejak diberlakukannya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan wewenang pengelolaan perikanan kepada provinsi menyebabkan kebijakan antar lembaga tidak saling mendukung. Indikator kapasitas pemangku kepentingan dalam *flag model* ditandai dengan warna kuning (status sedang) karena ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem namun tidak sesuai dan tidak difungsikan sesuai bidang keahlian/pekerjaannya.



Gambar 1. Diagram layang nilai indeks pada domain kelembagan

Berdasarkan Gambar 1. di atas hasil analisis skor indikator menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pembangkit utama dalam peningkatan status perikanan aspek domain kelembagaan di Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan urutan prioritasnya adalah; (1) Mekanisme pengambilan keputusan, (2) Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, (3) Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan, (4) Kapasitas pemangku kepentingan, (5) Rencana pengelolaan perikanan, dan (6) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal.

Salah satu indikator pada domain ini yang memiliki paling sedikit kontribusi dalam peningkatan status domain kelembagaan dalam status pengelolaan perikanan adalah mekanisme pengambilan keputusan. Tidak adanya mekanisme dalam pengelolaan perikanan disebabkan oleh pelimpahan wewenang pengelolaan perikanan dari daerah/kabupaten ke provinsi (UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah), sehingga saat ini DKP Sorong Selatan masih melakukan proses inisiasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk membuat model pengelolaan perikanan yang nantinya dapat digunakan dan dikelola sendiri di kabupaten Sorong Selatan.

Rencana Aksi Perbaikan

Tabel 3. Rencana aksi perbaikan domain kelembagaan

DOMAIN KELEMBAGAAN															
Indikator	Nilai Tahun 0	Rencana Perbaikan													
		Jangka pendek (Tahun)					Jangka menengah (Tahun)					Jangka menengah (Tahun)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3. Mekanisme pengambilan keputusan	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. Rencana pengelolaan perikanan	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
6. Kapasitas pemangku kepentingan	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Analisis data primer

Berdasarkan (Tabel 4), di atas rencana aksi perbaikan sesuai dengan urutan prioritas untuk masing-masing indikator dalam domain kelembagaan, yaitu :

1. Indikator mekanisme pengambilan keputusan
 - Tahun pertama dilakukan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 2 – tahun ke 5 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 6 – tahun ke 15 dilakukan *Maintain Existing Strategy*
2. Indikator Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan
 - Tahun pertama dilakukan strategi pemulihan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 2 – tahun ke 7 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 8 – tahun ke 15 *Maintain Existing Strategy*
3. Indikator Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan

- Tahun pertama – tahun ke 2 dilakukan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 3 – tahun ke 6 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 7 – tahun ke 15 *Maintain Existing Strategy*
2. Indikator Kapasitas pemangku kepentingan
- Tahun pertama – tahun ke 2 dilakukan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 3 – tahun ke 6 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 7 – tahun ke 15 *Maintain Existing Strategy*
3. Indikator Rencana pengelolaan perikanan,
- Tahun pertama dilakukan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 2 – tahun ke 3 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 4 – tahun ke 15 *Maintain Existing Strategy*
4. Indikator Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal
- Tahun pertama – tahun ke 2 dilakukan *Restoration strategy*
 - Tahun ke 3 – tahun ke 6 dilakukan *Conservation Management Strategy*
 - Tahun ke 7 – tahun ke 15 *Maintain Existing Strategy*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem pada domain kelembagaan untuk komoditas udang di Kabupaten Sorong Selatan berada pada status sedang dengan nilai 2 (*Flag Model* Kuning). Hal tersebut dikarenakan satu dari enam indikator (mekanisme pengambilan keputusan) memberikan kontribusi paling sedikit (nilai buruk dengan skor 1) dalam peningkatan status pengelolaan perikanan, sedangkan lima indikator lainnya memberikan kontribusi sedang dengan nilai 2.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diajukan adalah pemerintah Kab. Sorong Selatan melalui DKP bersama stakeholders lainnya, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perikanan, perlu melakukan *Restoration Strategy* (Strategi Pemulihan/Perbaikan) untuk indikator Kelengkapan aturan main dan Mekanisme pengambilan keputusan. Sementara untuk indikator Rencana pengelolaan

perikanan, Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, dan kapasitas Pemangku kepentingan sebaiknya menerapkan strategi pemeliharaan (*Conservation Strategy*) dengan mencanangkan wilayah perairan sorong selatan menjadi kawasan konservasi yang dikelola bersama pemerintah dan stakeholders lainnya dalam meningkatkan status pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) khususnya komoditas udang di Kab. Sorong Selatan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan terhadap USAID SEA PROJECT dan Rekan-rekan WWF Sorong atas kesempatan yang telah diberikan selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto L. 2005. Assessing Sustainability of Fisheries Systems In A Small Island Region. *Proceedings of IIFET*. Tokyo: IIFET.
- Adrianto L, Habibi A, Fahrudin A, Azizy A, Susanti H A, Musthofa I. 2014. *Modul Indikator untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem*. Penerbit: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Akademi Perikanan Sorong. 2004. *Potensi Perikanan Kabupaten Sorong Selatan*. Akademi Perikanan Sorong. Kota Sorong.
- Charles AT. 2008. *Sustainable fishery systems*. John Wiley & Sons.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2016. Tentang
- Miller CA, Wyborn C. 2018. Co-production in global sustainability: histories and theories. *Environmental Science & Policy*.
- Negera Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No. 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.
- Negera Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Undang-Undang No 45, 2009 Perubahan Atas Undang- undang No.31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.
- Ostrom E. 1985. Formulating the elements of institutional analysis. Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Indiana University Project, U. S. (2018).. USA. In Conference. *Institutional Analysis and Development*. 2 (2): 21-22).
- Razak AF. 2018. Status Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) pada Domain Sumberdaya Ikan untuk Komoditas Udang di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. *Jurnal Airaha*. 7(02): 47-59.
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Penerbit: Rineka Cipta. Jakarta.
- Subagyo, J. P. (2011). *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek..*Penerbit Aneka Cipta. Jakarta.
- (n.d.). Undang-Undang No 23 tahun 2014.
- USAID SEA Project. 2017. *Baseline Report Sorong Selatan Papua Barat Province Ecology, Fisheries and Social's Status*. WWF-ID | SEA Project.

WWF Indonesia. (n.d.). *eafm-indonesia.net*. Retrieved 2019, from [eafm-indonesia.net/tentang/EAFM/eafm-di-Indonesia](http://www.eafm-indonesia.net/tentang/EAFM/eafm-di-Indonesia):<http://www.eafm-indonesia.net/tentang/EAFM/eafm-di-Indonesia>